



Politik Transaksional Dalam Pemilu (Studi Pada Masyarakat Bontoa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan)

Arafah, Miftahul Hijrah, Nur Asisah, St. Junaeda

Universitas Negeri Makassar

arafah02212@gmail.com

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

Keywords: *Politik, Penyuapan, dan Pemilu*

Abstract: : Politik transaksional dalam pemilu masih marak terjadi salah satunya adalah penyuapan. Penyuapan dalam masyarakat Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru dalam dunia politik. Penyuapan pada saat ini masih sering terjadi ditengah masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para calon yaitu mendapatkan suara terbanyak pada saat pemilihan. Bontoa dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan alasan, bahwa selain karena tingkat partisipasi masyarakat yang terdaftar relatif tinggi. Juga karena beberapa pemilihan di Bontoa juga kerap sekali di datangi oleh calon untuk meminta suara dengan menawarkan sejumlah uang maupun barang. Penyuapan dalam politik ini menjadi daya tarik untuk dikaji karena hal tersebut secara tidak sadar sudah menjadi budaya dalam masyarakat Bontoa. Ketika mendekati hari pencoblosan para calon akan mencari masyarakat untuk di jadikan sebagai objek yang akan disuap dengan memberikan berupa uang, makanan, dan pakaian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode wawancara, diskusi, dan observasi pada masyarakat di Bontoa. Hasil penelitian dalam pandangan Antropologi politik kasus politik transaksional dalam pemilu yaitu penyuapan sudah menjadi fenomena sosial budaya yang harusnya kita musnahkan karena jika demikian terjadi terus menerus maka indonesia menjadi negara yang penuh oleh para koruptor di dalamnya.

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi yang masih muda, Indonesia masih rentan polik uang. Indonesia berada di peringkat ketiga sedunia dalam hal banyaknya praktik politik uang atau buying voters saat pemilihan umum (ungkap Burhanuddin Muhtadi dalam PPIM Seminar Seri Ke-33 di Ciputat).



Secara prosedural, Indonesia telah merintis konsolidasi demokrasi secara baik seiring dengan pelaksanaan tiga pemilu legislatif secara berturut-turut pascareformasi, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan ratusan pilkada di tingkat provinsi. Namun, secara faktual, perkembangan demokrasi di Indonesia telah dihambat dengan maraknya bentuk-bentuk money politik, tak terkecuali di tingkat akar rumput dalam bentuk jual beli suara. Sikap pragmatis, seringkali menjadi pilihan bagi masyarakat yang akan memberikan suaranya. Fenomena ini tidak saja terjadi di Bontoa, tetapi juga telah menjadi fenomena yang relative bisa terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ward Berenschot (2019: 373) bahwa keluhan kesah tentang “politik transaksi: adalah topik lazim dalam diskusi tentang perpolitikan di Indonesia. Para pemilih berpikir bagaimana atau dari calon mana mereka bisa mendapatkan imbalan uang atau barang atas suara mereka, sementara dilain sisi, politisi memikirkan bagaimana mendapatkan dana kampanye dan bagaimana mendistribusikan dana kampanye tersebut dengan cara efisien. Dalam literature ilmu politik, pertukaran seperti ini disebut sebagai praktek klientelisme atau politik transaksional.

Penyuapan adalah bentuk dasar dari tindakan korupsi. Sangat disayangkan sekali karena pada saat ini penyuapan sudah menjadi budaya negara Indonesia. Ketika mendekati hari-hari pemilu maka para calon akan mencari masyarakat yang akan dijadikan sebagai objek untuk diberikan suap. Hal ini sudah menjadi budaya dalam masyarakat Bontoa ketika mendekati hari pemilu. Para calon yang serakah akan suara yang banyak pada saat pemilihan akan berusaha sebisa mungkin dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut. Dalam kasus politik penyuapan dalam masyarakat Bontoa modus yang dilakukan para calon yaitu dengan akan diberikan berupa gula, beras, minyak, pakaian, uang dan lain-lain. Bahkan hal yang paling parahnya adalah menyuapan para panitia suara untuk memberikan suara yang double. Para calon tidak segan-segan mengeluarkan biaya yang banyak untuk terpilih sebagai pemimpin. Jika hal ini terus terjadi maka negara Indonesia penuh dengan para koruptor. Dengan kata lain belum terpilih sudah melakukan hal yang buruk apalagi saat sudah menjabat.

Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan mengenai politik uang memang sudah diatur termasuk ancaman sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan tersebut, namun faktanya politik uang selalu muncul dan berpengaruh kuat dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan hal tersebut, bukan mustahil produk pemilu akan melahirkan pemimpin yang tidak amanah dan hanya berorientasi pada uang, sehingga berpotensi untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pandangan masyarakat Bontoa terkait dengan hadirnya fenomena sosial yaitu fenomena praktik politik transaksional atau klientelisme di sekitar mereka.

LANDASAN TEORI

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan



kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya.

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu. karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara (Susi Nuraeni, 2013 : 8).

Partisipasi politik menurut Ikhsan Dermawan (2014 : 32) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Menggunakan hak pilih di dalam sebuah pemilu hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik penting karena warga negara telah menyerahkan hak berkuasa kepada lembaga politik melalui pemilu dan tidak boleh kehilangan hak untuk membela diri dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan.

Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. (Aspinall & Berenschot, 2019; Aspinall & Hicken, 2019). Menurut Aspinall (2019), patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye. Tujuannya ialah mendapatkan dukungan politik dari mereka. Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang didominasi praktik politik uang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif hendak mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena atau sebuah realitas sosial. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dilapangan dengan melakukan wawancara dan pengamatan. Berikutnya juga menggunakan kajian pustaka terhadap temuan-temuan atau hasil penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan (Patrick J.Rimbing, 2015 : 6).



Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 4 orang yang dipilih dari masyarakat yang sudah memiliki hak pilih. Selain dari masyarakat pemilih, ada juga 2 orang informan dari pihak pemerintah atau penyelenggara pemilu PPK atau Panwas. Ada juga 1 orang informan dari calon DPR.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara kepada sejumlah informan, observasi di lingkungan masyarakat Bontoa, dan sejumlah data berupa dokumen kependudukan dari instansi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mata Pencarian dan Tingkat Pendidikan

Menurut pengamatan saya terkait perekonomian masyarakat Bontoa mengenai mata pencarian masyarakat yaitu sebagian besarnya sebagai pedagang, pegawai, dan petani. Bagi masyarakat yang mata pencarian sebagai pedagang ada yang berjualan di pasar dan berjualan di toko seperti menjual sayur, kelontong, sembako, alat bangunan, makanan saji, apotek, bengkel, dan laundry. Bagi masyarakat yang mata pencarian sebagai pegawai ada dokter, polisi, tentara, guru, bank, dan tenaga kesehatan. Bagi masyarakat yang mata pencarian sebagai petani ada membajak sawah dan ladang. Menurut pengamatan saya terkait tingkat pendidikan masyarakat Bontoa bisa dikatakan tinggi karena ada sekolah di sana seperti SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi.

Menurut pengamatan saya bisa dikatakan bahwasannya tingkat perekonomian dan pendidikan saling berkesinambungan. Ketika pendidikan tinggi namun perekonomian lemah, maka akan terjadi kemungkinan untuk melaksanakan politik transaksional. Namun, masyarakat awam yang melaksanakan politik transaksional karena kurangnya pemahaman akan hal tersebut. Dalam masyarakat Bontoa yang memiliki perekonomian tinggi, maka tentu saja akan mengajukan diri untuk menjadi kepala desa, DPR, Bupati, dan lain-lain.

Menurut hasil pengamatan peneliti dan juga berdasarkan data yang diperoleh dengan wawancara, mayoritas penduduk Bontoa adalah Suku Makassar. Salah satu cara paling mudah mengidentifikasi identitas kesukuan mereka adalah lewat bahasa yang digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas masyarakat Bontoa menggunakan Bahasa Makassar dengan Lakiung. Demikian juga dengan anak usia sekolah SD, SMP dan SMA, juga masih familiar dan masih bisa menggunakan Bahasa Makassar secara baik. Selain Suku Makassar sebagai Suku yang mayoritas menjadi warga Bontoa, juga terdapat suku lain seperti Suku Bugis, tetapi jumlahnya sedikit. Sejauh hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan masyarakat, kehidupan sosial masyarakat Bontoa cukup harmonis. Perbedaan suku tidak pernah menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Bontoa mampu hidup berdampingan dengan perbedaan-perbedaan yang muncul diantara mereka.

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut narasumber (warga Bontoa) penamaan Bontoa merujuk pada kondisi tanah rendah. Kondisi Bontoa atau Bonto itu merujuk kepada kawasan persawahan padi basah, rawa serta daerah dekat akses sungai dan laut. Oleh karena itu pada mulanya



masyarakat Bontoa matapencaharian sebagai petani, tetapi sekarang sudah tidak banyak. Selain sebagai petani, masyarakat Bontoa juga memiliki ragam profesi baik sebagai pegawai negeri maupun dalam usaha perdagangan dan jasa. Saat ini, umumnya masyarakat yang tetap berprofesi sebagai petani adalah yang sudah berusia 40 tahun keatas. Sedangkan untuk yang masih muda, mereka cenderung memilih profesi lain seperti berdagang atau buka usaha-usaha kecil. Perkembangan teknologi saat ini juga turut mendukung semakin meningkatnya taraf kehidupan masyarakat, terutama bagi anak-anak muda. Banyak diantara anak muda yang memanfaatkan media sosial untuk jualan secara online. Hal ini dirasa oleh masyarakat setempat menjadi cukup efektif karena bias mengurangi biaya operasional misalnya tidak butuh ruangan yang besar atau tidak butuh menyewa tempat. Usaha seperti ini bisa mereka lakukan dari rumah sendiri seperti jualan produk makanan, kue ataupun kebutuhan sekunder lain seperti produk perawatan yang mereka jual secara online.

Kecamatan Bontoa memiliki luas 93,52 km² dan penduduk berjumlah 31.264 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 334,30 jiwa/km² pada tahun 2021. Adapun rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Bontoa pada tahun tersebut adalah 100,29. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 100 penduduk laki-laki (Data diolah dari dokumen yang dimiliki oleh pemerintah Desa juga bersumber dari Wikiwanda).

Menurut narasumber (warga Bontoa) tingkat partisipasi masyarakat Bontoa ketika pemilu bisa terbilang cukup tinggi. Terlihat ketika periode ke-I tahun 1999-2004 sewaktu pasangan Bupati Maros mencalonkan dan naik kadidat yaitu Drs. H. Andi Najamuddin Amirullah, B. A dan Drs. H. Andi Paharuddin pada saat pemilu. Terlebih pada periode ke-2 tahun 2005-2010 sewaktu pasangan Bupati Maros kembali mencalonkan dan berhasil naik pangkat lagi dibawah naungan partai golkar. Dalam hal ini yang menjadi pembahasan adalah Wakil Bupati Maros yaitu Drs. H. Andi Paharuddin berhasil naik pangkat menjadi Wakil Bupati Maros di dua periode yaitu periode pertama (tahun 1999-2004) dan periode kedua (tahun 2005-2010). Drs. H. Andi Paharuddin atau Puang Sila (Puang nama kehormatan Suku Bugis) atau Karaeng Sila (Karaeng nama kehormatan Suku Makassar) merupakan warga dari Bontoa yang mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Maros. Seorang tokoh masyarakat yang berpengaruh dan juga politisi asal Tete Batu, Bontoa, Kabupaten Maros. Sebelum menjadi Wakil Bupati Maros, Andi Paharuddin telah lama mengabdikan diri di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maros. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Desa Moncongloe, Camat Mandai, Camat Tanralili, Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Maros. Disamping sebagai pejabat eksekutif, ia juga pernah berkarier sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maros.

Menurut narasumber (warga Bontoa) mengatakan bahwa, dilihat dari partisipasi masyarakat yang sangat tinggi pada Drs. H. Andi Paharuddin hingga akhirnya mampu naik jabatan menjadi Wakil Bupati Maros di dua periode berturut-turut. Dukungan dari masyarakat Bontoa sangat berpengaruh pada Drs. H. Andi Paharuddin untuk dapat menjadi Wakil Bupati Maros. Ada aspek lain yang memengaruhi selain dari segi kekerabatan masyarakat karena sesama masyarakat Bontoa maka akan lebih baik untuk mendukung sesama. Drs. H. Andi Paharuddin juga merupakan warga yang terkenal akan karismanya,



sifatnya, karakternya, dan martabaknya, serta kedudukan yang sangat baik dalam lingkungan masyarakat Bontoa.

Menurut pengamatan saya jika ditinjau dari kondisi sekarang ini, masyarakat Bontoa mulai banyak menerima politik transaksional dalam pemilu. Melihat sewaktu pasangan Bupati Maros Drs. H. Andi Najamuddin Amirullah, B. A dan Drs. H. Andi Paharuddin karena dari aspek sifat, martabak, dan kepeduliannya pada masyarakat Bontoa. Namun yang namanya dunia pemerintahan tidak akan mungkin lepas dari politik transaksional. Banyak masyarakat Bontoa yang hanya sekedar menerima penyuapan para calon tanpa mempertimbangkan dampak kedepannya bagi kehidupan.

3. Modal dan Model Kampanye Saat Menjelang PEMILU

Menurut narasumber (warga Bontoa yang pernah mencalonkan menjadi DPR) hal yang perlu diperhatikan adalah modal kampanye berapa sehingga akan mengaktualisasikan kepada model kampanye. Modal kampanye yang dibutuhkan adalah ratusan juta bahkan sampai miliaran. Selanjutnya mengenai model kampanye itu semua tergantung pihak dari masing-masing calon.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti saat melakukan wawancara dengan informan bahwa ada tiga teknik pemungutan yang dilakukan para calon untuk menarik simpati masyarakat. Pertama calon mengundang masyarakat Bontoa untuk menghadiri kegiatan berkumpul bersama dengan mengutus tim sukses. Nah, ketika kegiatan berlangsung maka calon akan berkampanye dengan berceramah untuk memberikan janji-janji pada masyarakat untuk menarik simpatinya. Kedua calon akan mengutus tim suksesnya yang merupakan salah satu warga dari masyarakat Bontoa ke rumah masyarakat dengan memberikan sejumlah janji-janji, uang maupun barang. Teknik yang digunakan adalah tim sukses mendata masyarakat dengan mendatangi rumah yang satu ke yang lainnya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan suara terbanyak saat pemilu. Ketiga calon akan konvoi di jalanan dengan menggunakan mobil ataupun motor kemudian berkampanye dengan berceramah janji-janji pada masyarakat Bontoa serta kemudian akan membagikan brosur-brosur pada masyarakat sekit yang dilewati di jalan.

Berdasarkan narasumber salah satu warga Bontoa yang pernah mencalonkan menjadi anggota DPR. Model kampanye yang dilakukan para calon DPR itu bermacam bentuknya. Persoalan dana untuk menjadi calon anggota DPR yang diperlukan berkisaran milyaran. Misalnya saja satu warga mendapatkan Rp.100.000 dan jika dalam satu keluarga ada 5 orang jadi total semuanya adalah Rp.500.000 untuk satu rumah warga saja. Belum lagi jika sudah diberikan uang penyuapan, namun mendukung anggota DPR lainnya yang uang penyuapannya lebih banyak. Selain uang ada juga yang memberikan berupa beras, gula, minyak, dan pakaian yang digunakan sebagai barang untuk penyuapan.

Menurut pengamatan saya ada dua modal utama dalam kampanye yaitu modal sosial dan modal ekonomi. Ketika calon memiliki modal sosial dalam artian ada kekerabatan, sikap, dan karakter yang baik maka hal itu tentu akan sangat mendukung dalam pemilihan. Lain halnya ketika calon memiliki modal ekonomi maka apapun segala



cara akan dilakukan dengan uang baik itu melakukan politik transaksional dengan berbagai macamnya.

Menurut narasumber yang merupakan warga Bontoa sebagai panitia pemilu model kampanye dalam pemilu itu tergantung pada modal dan modelnya. Ketika modal ekonominya banyak maka calon akan mencari tim sukses sebanyak mungkin, bahkan yang menjadi panitia bisa saja menjadi tim sukses.

Dari pembahasan diatas dapat dipahami bahwa masyarakat Bontoa banyak yang bermata pencaharian sebagai seorang pedagang dan pegawai. Penduduk masyarakat Bontoa mayoritasnya adalah memiliki dua suku yaitu suku Makassar dan suku Bugis. Tingkat partisipasi masyarakat terkait pemilu itu ada dua hal yang menyebabkan yang pertama karena karakter baik calon dan yang kedua karena politik transaksional yang kuat. Model kampanye yang dilakukan calon untuk menarik simpati masyarakat berbeda ada yang berceramah, memberikan barang maupun uang, dan melakukan konvoi di jalan.

Dari Pengamatan saya politik transaksional tidak hanya terjadi di Kabupaten Maros tapi hal ini juga terjadi di Kabupaten Pinrang. Saya yang merupakan salah satu warga dari Kabupaten Pinrang tepatnya berada di lingkungan Kessie, saya melihat fenomena ini juga terjadi di sana. Banyak para calon yang melakukan hal politik transaksional dengan cara penyuapan berupa uang, baju, makanan pokok, dan lain-lain yang akan dibagikan ke rumah warga di Kessie. Jadi politik transaksional sudahlah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia dalam pemilihan umum.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya politik transaksional dari periode ke periode semakin meningkat. Yang menjadi seorang pemimpin bukan lagi karena karakter calon tapi penyuapan yang kuat. pandangan masyarakat Bontoa terkait dengan hadirnya fenomena sosial yaitu fenomena praktik politik transaksional atau klientalisme di sekitar mereka itu saat ini sudah menjadi budaya. Hal ini tentunya bukan hal baik bagi masyarakat karena lambat laun pemimpin yang harusnya menjadi sosok pemimpin malah menjadi perampok.

DAFTAR REFERENSI

- Barenschot, W., & Klinken. G.V. (2019). *Citizenship in Indonesia Perjuangan Atas Hak, Identitas dan Partisipasi*. Jakarta: yayasan Obor Pustaka Indonesia kerjasama dengan KITLV
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53-61.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152.
- Wardana, A.F.G. (2020). *Politik Uang Dalam Pemilihan Umum : Kajian Perspektif Demokrasi*





dan Islam. Journal Of Islamic and Law Studies. 4(2), 49-62.

Wawancara dengan Beberapa Informan (Masyarakat Tokoh Masyarakat Bontoa Sulawesi Selatan).